



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.485, 2009

KEMENTERIAN KEUANGAN. Dana Alokasi
Khusus. Pedoman.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 175 /PMK.07/2009

TENTANG
ALOKASI DAN PEDOMAN UMUM DANA ALOKASI KHUSUS
TAHUN ANGGARAN 2010

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2010 telah ditetapkan alokasi Dana Alokasi Khusus ke daerah untuk Tahun Anggaran 2010;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, Menteri Keuangan menetapkan alokasi Dana Alokasi Khusus perdaerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Alokasi dan Pedoman Umum Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2010;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5075);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 8. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009;
 9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 21/PMK.07/2009 tentang Pelaksanaan Penyaluran dan Pertanggungjawaban Anggaran Transfer ke Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

**PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG
ALOKASI DAN PEDOMAN UMUM DANA ALOKASI
KHUSUS TAHUN ANGGARAN 2010.**

BAB I

RUANG LINGKUP

Pasal 1

Dana Alokasi Khusus (DAK) dialokasikan untuk membantu daerah mendanai kebutuhan fisik sarana dan prasarana dasar yang merupakan prioritas nasional di bidang pendidikan, kesehatan, jalan, irigasi, air minum, sanitasi, prasarana pemerintahan, kelautan dan perikanan, pertanian, lingkungan hidup, keluarga berencana, kehutanan, sarana dan prasarana perdesaan, serta perdagangan.

BAB II

ALOKASI

Pasal 2

- (1) Alokasi DAK untuk Tahun Anggaran 2010 ditetapkan sebesar Rp21.133.382.500.000,00 (dua puluh satu triliun seratus tiga puluh tiga miliar tiga ratus delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).
- (2) Alokasi DAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan untuk:
 - a. Bidang Pendidikan sebesar Rp9.334.882.000.000,00 (sembilan triliun tiga ratus tiga puluh empat miliar delapan ratus delapan puluh dua juta rupiah);
 - b. Bidang Kesehatan sebesar Rp2.829.760.000.000,00 (dua triliun delapan ratus dua puluh sembilan miliar tujuh ratus enam puluh juta rupiah) terdiri atas:
 1. Pelayanan Kesehatan Dasar sebesar Rp2.223.660.000.000,00 (dua triliun dua ratus dua puluh tiga miliar enam ratus enam puluh juta rupiah); dan
 2. Pelayanan Kesehatan Rujukan sebesar Rp606.100.000.000,00 (enam ratus enam miliar seratus juta rupiah).
 - c. Bidang Jalan sebesar Rp2.810.207.000.000,00 (dua triliun delapan ratus sepuluh miliar dua ratus tujuh juta rupiah);
 - d. Bidang Irigasi sebesar Rp968.402.000.000,00 (sembilan ratus enam puluh delapan miliar empat ratus dua juta rupiah);

- e. Bidang Air Minum sebesar Rp357.231.500.000,00 (tiga ratus lima puluh tujuh miliar dua ratus tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);
- f. Bidang Sanitasi sebesar Rp357.231.500.000,00 (tiga ratus lima puluh tujuh miliar dua ratus tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);
- g. Bidang Prasarana Pemerintahan sebesar Rp386.253.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh enam miliar dua ratus lima puluh tiga juta rupiah);
- h. Bidang Kelautan dan Perikanan sebesar Rp1.207.840.000.000,00 (satu triliun dua ratus tujuh miliar delapan ratus empat puluh juta rupiah);
- i. Bidang Pertanian sebesar Rp1.543.633.000.000,00 (satu triliun lima ratus empat puluh tiga miliar enam ratus tiga puluh tiga juta rupiah);
- j. Bidang Lingkungan Hidup sebesar Rp351.610.000.000,00 (tiga ratus lima puluh satu miliar enam ratus sepuluh juta rupiah);
- k. Bidang Keluarga Berencana sebesar Rp329.010.000.000,00 (tiga ratus dua puluh sembilan miliar sepuluh juta rupiah);
- l. Bidang Kehutanan sebesar Rp250.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh miliar rupiah);
- m. Bidang Sarana dan Prasarana Perdesaan sebesar Rp300.000.000.000,00 (tiga ratus miliar rupiah); dan
- n. Bidang Perdagangan sebesar Rp107.322.500.000,00 (seratus tujuh miliar tiga ratus dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).

BAB III
PENETAPAN ALOKASI
Bagian Pertama
Kriteria
Pasal 3

- (1) Besaran Alokasi DAK masing-masing daerah ditentukan dengan penghitungan indeks Kriteria Umum, Kriteria Khusus, dan Kriteria Teknis.

- (2) Kriteria Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dalam membiayai kebutuhan-kebutuhan pembangunan daerah yang dicerminkan dari penerimaan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dikurangi belanja pegawai.
- (3) Kriteria Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan karakteristik daerah.
- (4) Kriteria Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memperhatikan:
 - a. Seluruh daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Papua, Provinsi Papua Barat, dan daerah tertinggal/terpencil diprioritaskan mendapat alokasi DAK; dan
 - b. Karakteristik Daerah yang meliputi daerah pesisir dan/atau kepulauan kecil, daerah perbatasan dengan negara lain, daerah rawan bencana, daerah yang masuk dalam kategori ketahanan pangan, dan daerah pariwisata.
- (5) Kriteria Teknis kegiatan DAK perbidang dirumuskan oleh menteri-menteri atau kepala badan sebagai berikut:
 - a. Bidang Pendidikan dirumuskan oleh Menteri Pendidikan Nasional;
 - b. Bidang Kesehatan dirumuskan oleh Menteri Kesehatan;
 - c. Bidang Jalan, Irigasi, Air Minum, dan Sanitasi dirumuskan oleh Menteri Pekerjaan Umum;
 - d. Bidang Prasarana Pemerintahan dirumuskan oleh Menteri Dalam Negeri;
 - e. Bidang Kelautan dan Perikanan dirumuskan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan;
 - f. Bidang Pertanian dirumuskan oleh Menteri Pertanian;
 - g. Bidang Lingkungan Hidup dirumuskan oleh Menteri Negara Lingkungan Hidup;
 - h. Bidang Keluarga Berencana dirumuskan oleh Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional;
 - i. Bidang Kehutanan dirumuskan oleh Menteri Kehutanan;

- j. Bidang Sarana dan Prasarana Perdesaan dirumuskan oleh Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal; dan
 - k. Bidang Perdagangan dirumuskan oleh Menteri Perdagangan.
- (6) Bagi 14 (empat belas) daerah otonom baru tahun 2008 dan tahun 2009, perhitungan alokasi DAK dilakukan sebagai berikut:
- a. kriteria umum dan kriteria khusus mengikuti daerah induknya; dan
 - b. kriteria teknis berdasarkan ketersediaan data teknis.

Bagian Kedua
Penetapan Alokasi
Pasal 4

Alokasi DAK Tahun Anggaran 2010 untuk masing-masing daerah provinsi, kabupaten, dan kota adalah sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini.

Bagian Ketiga
Arah Kegiatan
Pasal 5

- (1) DAK Bidang Pendidikan dialokasikan untuk menunjang pelaksanaan Program Wajib Belajar (Wajar) Pendidikan Dasar 9 Tahun yang bermutu dan merata untuk Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) sebagai berikut:
- a. Untuk Sekolah Dasar (SD) dengan lingkup kegiatan:
 1. pembangunan ruang perpustakaan/pusat sumber belajar SD/SDLB;
 2. perabot pendukung perpustakaan; dan
 3. pengadaan sarana peningkatan mutu pendidikan SD/SDLB, meliputi alat peraga, kit multimedia, buku pengayaan, buku referensi, ICT pendidikan, dan alat elektronik pendidikan.
 - b. Untuk Sekolah Menengah Pertama (SMP) dengan lingkup kegiatan:

1. pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) untuk menampung siswa-siswi SMP yang belum tertampung dan rasionalisasi jumlah siswa per kelas;
 2. pembangunan ruang perpustakaan atau pusat sumber belajar untuk SMP beserta perabotnya;
 3. pemenuhan kebutuhan buku referensi, pengayaan dan panduan sesuai standar BSNP (Badan Standar Nasional Pendidikan); dan
 4. pemenuhan kebutuhan alat-alat peraga dan pembelajaran bagi sekolah yang belum mempunyai alat tersebut yaitu alat laboratorium Bahasa, alat laboratorium Ilmu Pengetahuan Alam (IPA), dan Alat Matematika.
- (2) DAK Bidang Kesehatan dialokasikan untuk meningkatkan akses dan kualitas kegiatan bidang kesehatan pelayanan dasar dan rujukan terutama dalam rangka percepatan penurunan angka kematian ibu dan anak, perbaikan gizi masyarakat pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan bagi penduduk miskin dan penduduk di daerah tertinggal, terpencil, perbatasan dan kepulauan.
- (3) Lingkup kegiatan Bidang Kesehatan Pelayanan Dasar dan Rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari kegiatan sebagai berikut:
- a. Kegiatan Bidang Kesehatan Pelayanan Dasar terdiri dari kegiatan sebagai berikut:
 1. pembangunan Pos Kesehatan Desa (Poskesdes);
 2. pembangunan puskesmas, puskesmas perawatan; dan
 3. melengkapi puskesmas perawatan mampu PONED minimal 4 (empat) puskesmas perawatan perkabupaten/kota melalui pengadaan alat medis;
 4. pengadaan roda 2 (dua) untuk petugas Puskesmas dan Bidan di desa;
 5. pengadaan pusling perairan dan roda 4 (empat);
 6. pengadaan sarana pendukung penyimpanan vaksin/obat di instansi farmasi; dan

7. pengadaan obat generik dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan obat generik pada pelayanan kesehatan.
- b. Kegiatan Bidang Kesehatan Pelayanan Rujukan terdiri dari kegiatan sebagai berikut:
 1. peningkatan fasilitas tempat tidur kelas III rumah sakit yang terdiri dari pembangunan bangsal rawat inap kelas III dan pemenuhan set tempat tidur kelas III dan kelengkapannya;
 2. pemenuhan peralatan UTD RS;
 3. pemenuhan peralatan IGD RS;
 4. pembangunan sarana prasarana dan pemenuhan peralatan PONEK RS; dan
 5. pemenuhan Peralatan Kultur untuk *M.Tbc* di BLK Propinsi.
- (4) DAK Bidang Jalan dialokasikan untuk mempertahankan dan meningkatkan tingkat pelayanan prasarana jalan provinsi, kabupaten, dan kota dalam rangka memperlancar distribusi penumpang, barang jasa, serta hasil produksi yang diprioritaskan untuk mendukung sektor pertanian, industri, dan pariwisata sehingga dapat memperlancar pertumbuhan ekonomi regional, serta menunjang percepatan pembangunan sarana dan prasarana jalan.
- (5) Lingkup kegiatan DAK Bidang Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri dari kegiatan pemeliharaan berkala, peningkatan dan pembangunan jalan propinsi, jalan kabupaten/kota yang telah menjadi urusan daerah.
- (6) DAK Bidang Irigasi dialokasikan untuk mempertahankan tingkat layanan, mengoptimalkan fungsi, dan membangun prasarana sistem irigasi, termasuk jaringan reklamasi rawa dan jaringan irigasi desa yang menjadi kewenangan kabupaten/kota dan provinsi khususnya daerah lumbung pangan nasional dalam rangka mendukung program katahanan pangan.
- (7) Lingkup kegiatan DAK Bidang Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) terdiri dari kegiatan peningkatan, rehabilitasi, dan pembangunan jaringan irigasi.

- (8) DAK Bidang Air Minum dialokasikan untuk meningkatkan cakupan dan kehandalan pelayanan air minum untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat.
- (9) Lingkup kegiatan DAK Bidang Air Minum sebagaimana dimaksud pada ayat (8) terdiri dari kegiatan penyempurnaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) eksisting, pembangunan SPAM baru, dan perluasan jaringan dan peningkatan sambungan rumah untuk masyarakat miskin.
- (10) DAK Bidang Sanitasi dialokasikan untuk meningkatkan cakupan dan kehandalan pelayanan air minum untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat.
- (11) Lingkup kegiatan DAK Bidang Sanitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (10) terdiri dari kegiatan sebagai berikut:
 - a. penyempurnaan sistem dan pelayanan eksisting (air limbah, persampahan dan drainase);
 - b. pengembangan pelayanan sistem dan pelayanan baru (air limbah, persampahan dan drainase);
 - c. perluasan jaringan dan peningkatan sambungan pelayanan air limbah untuk masyarakat miskin dan/atau kumuh melalui pengembangan sistem air limbah komunal; dan
 - d. dukungan pada kegiatan 3 R (*reduce, reuse, recycle*).
- (12) DAK Bidang Pertanian dialokasikan untuk meningkatkan sarana dan prasarana pertanian ditingkat usaha tani dan desa dalam rangka peningkatan produksi bahan pangan dalam negeri guna mendukung ketahanan pangan nasional.
- (13) Lingkup kegiatan DAK Bidang Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (12) terdiri dari kegiatan sebagai berikut:
 - a. penyediaan fisik prasarana penyuluhan yang hanya digunakan untuk pembangunan/rehabilitasi Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) di tingkat kecamatan;
 - b. penyediaan fisik sarana dan prasarana pengelolaan lahan yang meliputi pembangunan/rehabilitasi jalan usahatani (JUT), jalan produksi, optimasi lahan, peningkatan kesuburan tanah, sarana/alat pengolah kompos, konservasi lahan, serta reklamasi lahan rawa pasang surut dan rawa lebak;

- c. penyediaan fisik sarana dan prasarana pengelolaan air yang meliputi:
 - 1. pembangunan/rehabilitasi jaringan irigasi tingkat usahatani (JITUT), jaringan irigasi desa (JIDES), tata air mikro (TAM), irigasi air permukaan, irigasi tanah dangkal, irigasi tanah dalam, pompanisasi, dam parit, dan embung; dan
 - 2. perluasan areal cetak sawah, pembukaan lahan kering/perluasan areal untuk tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan.
 - d. penyediaan lumbung pangan dalam rangka mendukung kelembagaan distribusi pangan masyarakat yang merupakan bagian dari upaya peningkatan ketahanan pangan nasional.
- (14) DAK Bidang Kelautan dan Perikanan dialokasikan untuk meningkatkan sarana dan prasarana produksi, pengolahan, peningkatan mutu, pemasaran, dan pengawasan serta penyediaan sarana dan prasarana pemberdayaan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang terkait dengan peningkatan produksi perikanan dan peningkatan kesejahteraan nelayan, pembudidaya, pengolah, pemasar hasil perikanan, dan masyarakat pesisir lainnya yang didukung dengan penyuluhan.
- (15) Lingkup kegiatan DAK Bidang Kelautan dan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (14) terdiri dari kegiatan sebagai berikut:
- a. penyediaan dan rehabilitasi sarpras produksi perikanan tangkap;
 - b. penyediaan dan rehabilitasi sarpras produksi perikanan budidaya;
 - c. penyediaan dan rehabilitasi sarpras pengolahan, peningkatan mutu dan pemasaran hasil perikanan;
 - d. penyediaan dan rehabilitasi sarpras pemberdayaan ekonomi masyarakat di pesisir dan pulau-pulau kecil yang terkait dengan konservasi dan pengembangan perikanan;
 - e. penyediaan sarana dan prasarana pengawasan; dan
 - f. penyediaan dan pengadaan sarpras penyuluhan perikanan.

- (16) DAK Bidang Prasarana Pemerintahan dialokasikan untuk meningkatkan kinerja pemerintahan daerah dalam menyelenggarakan pelayanan publik di daerah pemekaran dan daerah yang terkena dampak pemekaran sampai dengan tahun 2009 dan daerah lainnya yang prasarana pemerintahannya sudah tidak layak. Prioritas diberikan kepada daerah pemekaran tahun 2008 dan tahun 2009.
- (17) Lingkup kegiatan DAK Bidang Prasarana Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (16) terdiri dari kegiatan pembangunan/perluasan/rehabilitasi gedung kantor kepala daerah, DPRD, dinas, badan, dan gedung SKPD lainnya, dengan tetap memperhatikan kriteria umum, kriteria khusus, dan kriteria teknis dalam penentuan daerah penerima.
- (18) DAK Bidang Lingkungan Hidup dialokasikan untuk mendorong pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal bidang Lingkungan Hidup serta mendorong penguatan kapasitas kelembagaan di daerah, dengan prioritas meningkatkan sarana dan prasarana lingkungan hidup yang difokuskan pada kegiatan pencegahan pencemaran air, pencegahan pencemaran udara, dan informasi status kerusakan tanah.
- (19) Lingkup kegiatan DAK Bidang Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (18) terdiri dari kegiatan sebagai berikut:
 - a. pembangunan gedung laboratorium, pengadaan sarana dan prasarana pemantauan kualitas air, pengadaan laboratorium lingkungan bergerak;
 - b. pembangunan unit pengolahan sampah (3R), pembangunan teknologi biogas, pembangunan IPAL komunal;
 - c. penanaman pohon di sekitar sumber air di luar kawasan hutan, pembangunan sumur resapan/biopori, pembangunan taman hijau, pengadaan papan informasi, dan pengadaan alat pencacah gulma;
 - d. pengembangan sistem informasi lingkungan untuk memantau kualitas air;
 - e. pengadaan alat pemantauan kualitas udara, alat membuat asap cair, dan alat membuat briket arang; dan
 - f. pengadaan alat pemantau kualitas tanah.

- (20) DAK Bidang Keluarga Berencana (KB) dialokasikan untuk meningkatkan akses dan kualitas pelayanan keluarga berencana yang terdiri dari:
- daya jangkau dan kualitas penyuluhan, penggerakan, dan pembinaan program KB tenaga lini lapangan;
 - sarana dan prasarana fisik pelayanan KB;
 - sarana dan prasarana fisik pelayanan komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) Program KB; dan
 - sarana dan prasarana fisik pembinaan tumbuh kembang anak.
- (21) Lingkup kegiatan DAK Bidang Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud pada ayat (20) terdiri dari kegiatan sebagai berikut:
- pengadaan sepeda motor bagi PKB/PLKB dan PPLKB;
 - pengadaan Mobil unit penerangan (Mupen) KB bagi kab/kota;
 - pengadaan Mobil Pelayanan KB Keliling bagi kab/kota;
 - pengadaan sarana pelayanan di klinik KB, yaitu Obgyn Bed dan Inplant Kit;
 - pengadaan Bina Keluarga Balita (BKB) KIT bagi desa/kelurahan;
 - pengadaan Public adress dan KIE Kit; dan
 - pembangunan gudang alokon.
- (22) DAK Bidang Kehutanan dialokasikan untuk meningkatkan fungsi Daerah Aliran Sungai (DAS) terutama di daerah hulu dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan daya dukungnya melalui kebijakan rehabilitasi hutan lindung dan lahan kritis, kawasan *mangrove* serta meningkatkan pengelolaan Taman Hutan Raya (Tahura) dan Hutan Kota yang menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah.
- (23) Lingkup kegiatan DAK Bidang Kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (22) terdiri dari kegiatan sebagai berikut:
- rehabilitasi hutan lindung dan lahan kritis di luar kawasan hutan, kawasan mangrove, Tahura, dan Hutan Kota;

- b. pengelolaan Tahura dan Hutan Kota termasuk pengamanan hutan;
 - c. pemeliharaan tanaman hasil rehabilitasi tahun sebelumnya;
 - d. pembangunan dan pemeliharaan bangunan sipil teknis (bangunan konservasi Tanah dan Air/KTA) yang meliputi dam penahanan, dam pengendali, *gully plug*, sumur resapan, embung dan bangunan konservasi tanah dan air lainnya;
 - e. peningkatan penyediaan sarana penyuluhan teknis Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL); dan
 - f. Rehabilitasi Lahan Kritis di dalam kawasan Hutan Lindung, Taman Hutan Raya, Hutan Mangrove dan Hutan Pantai.
- (24) DAK Bidang Sarana dan Prasarana Perdesaan dialokasikan untuk meningkatkan aksesibilitas dan ketersediaan prasarana dan sarana dasar, memperlancar arus angkutan penumpang, bahan pokok, dan produk pertanian lainnya dari daerah pusat-pusat produksi di perdesaan ke daerah pemasaran, serta mendorong peningkatan kualitas produktivitas, dan diversifikasi ekonomi terutama di perdesaan melalui kegiatan pembangunan infrastruktur yang diutamakan di daerah pesisir dan pulau-pulau kecil, daerah perbatasan dengan negara lain, daerah tertinggal/terpencil.
- (25) Lingkup kegiatan DAK Bidang Sarana dan Prasarana Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (24) terdiri dari kegiatan pengadaan moda transportasi perintis darat, laut dan air/rawa.
- (26) DAK Bidang Perdagangan dialokasikan untuk meningkatkan ketersediaan sarana perdagangan yang memadai sebagai upaya untuk memperlancar arus barang antar wilayah serta meningkatkan ketersediaan dan kestabilan harga bahan pokok, terutama di daerah perdesaan, tertinggal, terpencil, perbatasan, pulau-pulau kecil terluar, dan paska bencana dan daerah pemekaran.
- (27) Lingkup kegiatan DAK Bidang Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (26) terdiri dari kegiatan pembangunan dan pengembangan pasar tradisional dan pasar penunjang.

BAB IV
DANA PENDAMPING

Pasal 6

- (1) Daerah penerima DAK wajib menyediakan Dana Pendamping sekurang-kurangnya 10% (sepuluh persen) dari alokasi DAK masing-masing bidang.
- (2) Dana Pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBD.
- (3) Dana Pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk kegiatan fisik.

BAB V

PENGANGGARAN DAN PELAKSANAAN KEGIATAN

Pasal 7

- (1) Daerah penerima DAK wajib mencantumkan alokasi dan penggunaan DAK di dalam APBD.
- (2) Penggunaan DAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan Petunjuk Teknis Penggunaan DAK yang ditetapkan oleh Menteri Teknis terkait.
- (3) Petunjuk Teknis ditetapkan paling lambat 2 (dua) minggu sesudah Peraturan Menteri Keuangan ini diundangkan.
- (4) Dalam hal Tahun Anggaran 2010 sudah dimulai dan Petunjuk Teknis belum ditetapkan, pemerintah daerah dapat menggunakan petunjuk teknis DAK tahun sebelumnya sepanjang pilihan kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan arahan kebijakan dan kegiatan DAK Tahun Anggaran 2010 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan kegiatan yang didanai DAK harus selesai paling lambat pada tanggal 31 Desember 2010.
- (2) Hasil dari kegiatan yang didanai DAK harus sudah dapat dimanfaatkan pada akhir tahun 2010.

Pasal 9

- (1) Daerah penerima DAK dapat melakukan optimalisasi penggunaan atas besaran DAK yang diterimanya.

- (2) Optimalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan untuk kegiatan pada bidang yang sama pada tahun anggaran berjalan.
- (3) Dalam hal terdapat sisa DAK pada saat tahun anggaran berakhir, dapat digunakan pada tahun anggaran berikutnya untuk mendanai kegiatan pada bidang yang sama sesuai dengan petunjuk teknis penggunaan DAK Tahun Anggaran 2010.

BAB VI

PELAPORAN

Pasal 10

- (1) Daerah menyampaikan laporan triwulan yang memuat laporan pelaksanaan kegiatan dan penggunaan DAK kepada Menteri Teknis dan tembusan kepada Menteri Keuangan c.q Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) paling kurang meliputi gambaran, rencana kegiatan/program kerja dalam rangka pelaksanaan, sasaran yang ditetapkan, hasil yang telah dicapai, hambatan dan permasalahan dalam pelaksanaan, dan jumlah dana yang terealisasi.
- (3) Menteri Teknis menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan DAK setiap akhir tahun anggaran kepada Menteri Keuangan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas dan Menteri Dalam Negeri.

BAB VII

PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PENGAWASAN

Pasal 11

- (1) Menteri Teknis melakukan pemantauan dan evaluasi dari segi teknis terhadap penyelenggaraan kegiatan di daerah yang dibiayai dari DAK sesuai dengan kewenangan masing-masing.
- (2) Menteri Keuangan melakukan pemantauan dan evaluasi keuangan DAK.
- (3) Pengawasan atas pelaksanaan DAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
PENYALURAN
Pasal 12

- (1) Penyaluran DAK dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Umum Daerah.
- (2) Penyaluran DAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pencairan bagi 14 (empat belas) daerah otonom baru tahun 2008 dan tahun 2009 dapat dilakukan apabila Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) telah terbentuk dan telah dilantik pejabatnya.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 13

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2010.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 November 2009
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 10 Desember 2009

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

PATRICALIS AKBAR

NO	DAERAH	Pendidikan	Kesehatan			Infrastruktur Dasar	Sanitasi	Prasarana Pemerintahan dan Penitikanan	Keluarga Berencana	Lingkungan Hidup	Kehutanan	Sarana Prasaranan Perekonomian	Perdagangan	TOTAL	
			Pelayanan Rujukan	Jalan	Infrasri										
480	Kab. Deli	7.419,60	9.119,00	4.672,20	14.808,00	6.348,50	724,96	515,50	10.557,50	1.765,70		1.547,30	3.635,70		
XXXII	Provinsi Papua Barat													21.755,50	
481	Kab. Sorong	7.433,40	5.245,70	5.245,10	1.389,70	751,00	605,30	4.655,60	5.355,90	971,90	748,00		2.206,30	33.329,30	
482	Kab. Manokwari	18.499,70	4.288,10	3.530,10	9.129,30	1.404,10	985,10	1.074,30	6.804,60	1.417,30	1.306,90	1.178,70	1.285,00	53.395,50	
483	Kab. Teluk Fak	8.182,90	4.151,70	2.402,10	7.605,20	969,50	732,00	554,50	2.136,20	1.772,40	1.226,90	715,00	959,30	30.824,30	
484	Kota Sorong	3.539,70	4.254,50	2.402,10	2.027,10	975,70	657,50	1.443,40	1.307,50	914,70	601,60	971,30	1.938,40	19.384,30	
485	Kab. Sorong Selatan	7.793,10	3.487,00	7.609,00	2.174,00	682,80	524,30	1.746,20	3.434,10	770,30	712,50	1.903,70	957,40	29.722,20	
486	Kab. Raja Ampat	11.388,50	5.281,70	4.907,30	11.686,00	916,10	747,50	2.079,20	6.947,20	2.664,90	1.969,40	712,40	2.222,20	912,30	
487	Kab. Teluk Bintuni	7.073,70	4.884,80	3.521,40	10.102,00	792,10	386,00	2.192,40	1.056,40	637,00	2.075,10		3.652,90	33.652,90	
488	Kab. Teluk Wondama	6.156,50	4.120,80	3.596,20	4.909,70	731,20	493,80	1.862,70	6.751,10	1.773,00	954,30	631,60	1.025,80	1.816,40	34.812,10
489	Kab. Kaimana	7.535,30	3.683,30	3.457,20	3.673,00	793,00	543,30	1.708,70	4.690,10	7.140,40	812,50	630,70	2.047,10	6185,40	31.648,60
490	Kab. Maybrat	7.911,00	3.998,10	4.143,60	566,50	801,00	634,60	5.909,50	3.015,50	8.044,70	760,00		864,00		
491	Kab. Tambrauw	6.320,90	5.532,90	4.513,40	583,80	720,90	1.034,00	5.909,60	1.233,20	1.962,80	721,70		837,40		25.400,20
Total Kab/Kota		9.334.882,00	2.223.660,00	495.100,00	2.388.676,00	677.883,00	357.231,50	366.253,00	1.207.940,00	1.543.633,00	351.610,00	325.010,00	244.000,00	300.000,00	107.322,50
Total Provinsi		-	111.000,00	421.331,00	250.321,00	-	-	-	-	-	-	-	6.000,00	-	85.052,00
Total Nasional		5.134.882,00	2.223.660,00	606.100,00	2.810.207,00	968.402,00	357.231,50	366.253,00	1.207.940,00	1.543.633,00	351.610,00	325.010,00	250.000,00	300.000,00	107.322,50
															21.133.382,50

MENTERI KEUANGAN

SRI MULYANI INDRAWATI

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 175 /PMK.07/2009 TENTANG
ALOKASI DAN PEMERINTAHAN UNTUK
DANA ALOKASI KHUSUS (DAK)
ANGGARAN 2010

**PENETAPAN ALOKASI
DANA ALOKASI KHUSUS TAHUN 2010
UNTUK PROVINSI/KABUPATEN/KOTA**

NO	DAERAH	Pendidikan	Kesehatan		Prasarana Pelayanan Dasar	Jalan	Irigasi	Air Minum	Sanitasi	Pemerintahan	Kehutanan dan Perikanan	Pertanian	Lingkungan Hidup	Keluarga Berencana	Sarana Prasaranan Perdesaan	Perdagangan	TOTAL			
			Rujukan	Rujukan																
I	Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam		3.224,60	14.660,70	12.471,60	568,60	1.746,90	1.333,20	3.008,60	774,30	767,80	1.006,10	1.007,20	998,90	30.356,90					
1	Kab. Aceh Barat	10.546,30	4.092,90	1.564,40	4.573,30	2.006,20	680,10	597,80	2.154,60	5.371,40	625,60	1.07,90	1.007,20	998,90	33.669,20					
2	Kab. Aceh Besar	15.908,40	4.470,70	1.762,60	5.416,20	2.206,10	776,60	541,50	3.442,50	4.000,90	627,70	842,10	803,50	996,00	1.052,30	40.026,80				
3	Kab. Aceh Selatan	11.486,90	4.645,50	1.798,80	5.530,00	2.197,40	691,70	548,30	2.125,60	3.225,60	913,40	752,10	1.360,00	752,10	38.490,30					
4	Kab. Aceh Singkil	11.803,00	4.328,20	1.287,80	5.151,10	1.124,40	691,70	493,30	1.405,80	3.484,80	604,30	798,30	878,40	980,50	824,10	34.193,00				
5	Kab. Aceh Tengah	11.771,10	3.287,90	1.657,40	3.221,10	2.187,60	778,70	500,00	1.704,80	2.937,80	897,10	903,50				32.280,30				
6	Kab. Aceh Tenggara	13.032,10	4.072,80	2.566,60	3.661,40	2.691,00	741,90	500,00	4.116,59	6.201,80	807,20	1.03,40	986,40	1.046,70		33.659,00				
7	Kab. Aceh Timur	19.724,40	4.863,80	1.639,30	7.372,60	2.030,60	803,70	773,40									51.423,80			
8	Kab. Aceh Utara	6.440,70	7.440,30	4.270,50	832,60	764,60				4.037,00	5.442,30	746,10	1.142,40	856,80	729,00	2.433,00				
9	Kab. Bireuen	19.173,20	5.754,10	3.104,00	4.408,50	2.233,00	669,80	628,30		5.039,00	5.924,90	759,20	989,40	951,00	2.051,30		51.205,80			
10	Kab. Pidie	17.471,30	5.914,00	3.483,40	4.449,60	2.892,70	669,40	676,40		3.362,60	4.601,50	928,70	1.100,80	872,30	978,70	2.492,00		46.610,20		
11	Kab. Simeulue	9.541,40	1.980,80	2.451,80	2.345,20	624,10	951,30			4.769,00	2.852,40	529,40	748,30	842,90	1.385,50			33.835,50		
12	Kota Banda Aceh	8.206,30	3.769,80	2.547,10	2.769,70	654,40	946,80	1.716,20		1.971,30		832,90	706,80				21.351,60			
13	Kota Sabang	7.671,30	2.303,00	2.759,20	1.589,80	581,00	532,20			1.977,60		956,30	641,10	874,50			19.898,00			
14	Kota Langsa	8.597,80	3.340,30	2.243,60	2.069,40	518,20	538,90			2.014,20		590,40	653,20				21.624,70			
15	Kota Lhokseumawe	8.117,20	3.529,00	2.354,50	2.662,50	655,40	658,80			2.338,20		525,20	661,30				19.227,10			
16	Kab. Nagan Raya	7.081,20	3.817,90	1.144,00	2.475,30	1.412,00	615,50	466,50		1.868,10	3.977,40	606,30	755,50				29.730,30			
17	Kab. Aceh Jaya	7.879,00	2.865,20	2.584,80	1.933,60	650,90	454,00	1.526,30		3.134,50	495,60	721,20	856,30	1.036,10			24.148,20			
18	Kab. Aceh Barat Daya	9.760,80	2.860,50	3.081,40	2.900,10	1.746,40	649,30	559,20		1.978,20	2.213,90	618,10	706,00	827,00	979,40	1.022,80		29.833,10		
19	Kab. Gayo Lues	3.878,40	1.069,00	3.621,50	3.069,00	2.099,50	689,20	689,20		1.802,20	3.643,30	473,10	685,40	872,90			27.831,00			
20	Kab. Aceh Tamring	15.287,00	4.541,10	3.836,00	3.143,00	715,20	558,90			2.351,80	3.303,60	606,70	746,20				35.373,10			
21	Kab. Bener Meriah	10.212,00	3.636,50	3.191,20	3.876,20	557,20	456,50			1.534,10	1.658,70	2.703,10	457,10	714,40			30.454,50			
22	Kab. Pidie Jaya	13.329,60	4.333,70	3.194,40	2.472,70	725,60	522,60			3.122,00	2.814,70	505,00	743,40				35.756,00			
23	Kota Subulussalam	10.676,50	3.451,70	3.496,00	3.496,00	682,40	685,20	477,90		3.175,50	1.125,80		494,40	647,40				25.120,00		
24	Kab. Asahan	23.271,00	5.723,90	16.855,30	12.282,40	1.900,30	807,80	654,20			3.140,50	2.938,20	625,70	843,00				25.137,70		
25	Kab. Dairi	20.139,00	4.235,60	2.023,70	4.140,40	2.619,00	682,60	487,60			987,30	4.718,60	703,90	704,00	955,60	916,90		44.113,80		
26	Kab. Deli Serdang	49.987,70	7.699,40	2.626,10	7.164,00	1.727,10	899,20	1.182,80			4.832,80	6.195,50	846,40	1.184,90	1.243,00			45.054,90		
27	Kab. Tanah Karo	22.218,90	3.871,30	5.403,00	2.274,50	654,30	511,60			1.371,40	7.996,50	705,60	807,80	871,50				45.054,90		
28	Kab. Labuhan Batu	23.340,50	2.200,20	1.627,60	7.174,60	904,40	576,40				1.908,40	3.809,80	844,40	737,10	1.140,00			48.258,30		
29	Kab. Langkat	34.315,10	6.548,70	9.008,50	1.483,90	953,50	791,10				5.661,10	853,50	810,00	1.005,40				65.865,70		
30	Kab. Mandailing Natal	31.941,40	4.705,20	2.435,70	7.933,20	870,40	917,20	658,50			1.580,10	4.559,90	858,30	810,30	809,70			56.131,40		
31	Kab. Nas	28.147,60	4.173,00	6.928,90	1.662,10	717,40	1.038,80				2.254,80	7.843,40	539,20	744,20	869,60	871,30		53.790,90		
32	Kab. Simalungun	37.374,30	5.680,60	6.983,40	6.227,60	767,30	832,70				1.677,90	7.998,70	823,00	955,30	938,50			70.279,30		
33	Kab. Tapulau Selatan	29.751,20	2.780,50	1.566,10	6.234,00	2.052,60	1.221,70	764,10			1.789,90	3.767,00	631,70	939,50				41.495,40		
34	Kab. Tapulau Tengah	29.855,40	5.019,50	1.140,90	4.301,10	1.666,70	727,90	562,30			2.557,60	2.844,60	843,50	765,50				51.299,90		
35	Kab. Tapulau Utara	26.955,60	4.051,20	1.481,60	2.152,50	478,10	478,10				1.109,90	3.185,50	581,90	842,10	1.108,70	1.020,90		48.018,50		
36	Kab. Toba Samosir	24.358,10	3.283,20	6.521,00	1.819,80	768,80	522,60	1.372,60			3.813,00	725,60	731,60	1.492,50				46.949,20		

37	Kota Binjai	15,458,70	3,457,80	1,830,80	588,80	960,00	869,30	976,30	869,80		24,831,50
38	Kota Medan	35,120,80	10,496,60	5,923,00	6,412,50	917,30	2,045,40	3,819,40	1,226,20	1,186,80	67,201,00
39	Kota Pematang Siantar	10,772,20	2,902,90	1,963,20	579,40	974,00			997,50	997,50	23,107,40
40	Kota Sibolga	8,684,00	2,950,20	1,238,20	584,00	735,10	2,277,60	2,418,80	661,20	649,30	18,35,90
41	Kota Tanjung Balai	9,440,20	3,401,50	1,564,00	571,40	611,20		860,10	1,017,50	1,017,50	19,508,40
42	Kota Tebing Tinggi	8,039,80	2,900,50	1,487,90	584,50	1,195,20	660,30	1,682,20	657,00	657,00	17,807,40
43	Kota Padang Sidempuan	9,332,50	4,280,90	1,922,20	525,40	650,70	1,190,20	664,70	692,60	808,80	20,861,60
44	Kab. Pakpak Bharat	7,637,30	2,360,60	2,889,40	2,549,30	842,00	616,80	834,40	924,50	2,996,80	710,50
45	Kab. Nias Selatan	42,052,80	5,024,70	5,024,70	3,788,90	1,201,20	557,40	2,584,00	710,70	1,011,10	588,80
46	Kab. Humbang Hasundutan	12,244,70	3,342,80	904,90	4,180,40	757,90	632,40	437,90	1,986,70	2,031,80	1,121,70
47	Kab. Samosir	32,412,30	5,429,20	1,230,40	9,594,50	904,00	827,40	623,70	3,387,60	4,503,10	524,90
48	Kab. Batu Bara	20,941,30	2,249,30	3,882,90	3,154,30	927,00	753,40	497,90	2,386,40	2,386,40	789,20
49	Kab. Padang Lawas	20,683,20	4,919,50	3,847,90	820,80	721,30	622,20	3,056,00	3,920,20	2,671,50	42,832,00
50	Kab. Padang Lawas	21,676,50	5,006,10	4,706,00	941,90	827,40	520,10	3,547,80	1,563,40	2,651,50	42,767,60
51	Kab. Padang Lawas Utara	16,545,00	4,036,20	2,987,00	984,30	1,092,10	487,70	3,558,20	1,463,00	2,530,10	816,30
52	Kab. Labuhan Batu Selatan	11,841,60	3,767,40	5,254,70	690,40	514,00	3,634,20	1,006,60	1,900,30	606,30	29,993,00
53	Kab. Labuhan Batu Utara	13,015,10	2,141,60	4,007,40	808,20	703,00	531,10	3,607,70	1,151,70	2,083,40	931,20
54	Kab. Nias Utara	13,820,70	4,522,90	5,245,30	815,90	811,60	788,50	5,023,50	1,367,10	3,974,50	697,30
55	Kab. Nias Barat	11,233,20	4,688,00	4,103,00	746,80	677,90	5,023,50	1,134,10	2,322,40	692,40	855,80
56	Kota Gunung Sitoli	11,384,80	3,774,30	764,00	719,00	868,10	5,023,50	1,238,80	704,30	848,00	29,888,80
III Provinsi Sumatera Barat											
57	Kab. Lima Putih Kuta	23,869,20	4,476,70	2,641,30	8,391,40	8,187,80					19,220,50
58	Kab. Limapuluh Kota	24,264,00	4,848,90	1,640,10	7,756,50	3,315,80	659,30	2,487,90	5,301,40	577,50	720,80
59	Kab. Kepulauan Mentawai	7,694,40	3,503,50	1,196,10	6,981,00	701,70	683,30	557,60	4,910,10	2,477,30	55,134,40
60	Kab. Padang Pariaman	24,053,70	5,247,30	5,447,10	3,185,60	778,70	649,20	1,556,70	5,289,10	626,90	29,930,70
61	Kab. Pasaman	11,345,60	4,087,40	1,025,20	4,525,40	1,764,70	678,30	552,30	2,196,20	6,141,70	615,90
62	Kab. Pesisir Selatan	26,396,70	5,431,40	11,618,70	2,07,70	680,20	638,90	5,345,20	6,408,00	503,30	840,90
63	Kab. Sungai Penuh	11,368,30	3,210,50	4,766,20	1,818,10	697,90	514,60	1,661,20	4,808,20	711,70	680,40
64	Kab. Solok	24,035,50	3,851,50	5,663,40	774,50	585,70	1,653,80	1,717,30	6,324,70	1,240,30	785,60
65	Kab. Tandah Datar	22,651,40	4,333,20	1,577,00	4,427,30	2,510,10	674,70	588,30	1,372,40	2,235,90	3,912,00
66	Kota Bukit Tinggi	8,166,40	3,219,10	1,710,10	3,193,60	346,00	588,10	992,30	898,50	808,00	622,10
67	Kota Padang Panjang	6,315,30	2,229,20	1,193,60	4,298,80	567,70	721,40	938,70	701,80	604,90	844,60
68	Kota Padang	24,726,80	6,470,20	4,047,00	1,198,20	691,90	988,50	2,807,30	891,80	807,60	918,20
69	Kota Payakumbuh	3,212,60	3,295,80	1,328,80	4,050,00	564,40	581,20	1,261,50	498,00	662,00	1,818,30
70	Kota Sawahlunto	7,047,50	2,863,80	1,438,70	2,044,80	414,50	584,50	1,463,60	876,70	602,20	1,042,50
71	Kota Solok	7,428,90	2,351,00		1,650,40	391,20	560,50	523,10	990,60	634,70	15,912,60
72	Kota Pariaman	8,921,00	2,894,90		1,846,60	630,60	604,30	553,80	1,427,40	622,90	1,927,20
73	Kab. Dharmasraya	20,463,20	4,397,50	1,562,00	6,689,90	1,891,70	749,60	607,20	4,036,00	6,129,90	624,50
74	Kab. Dharmasraya	13,992,30	3,381,00	987,40	5,349,30	1,083,90	653,10	498,20	3,780,00	4,681,00	817,30
75	Kab. Solok Selatan	9,209,50	3,728,10	3,398,70	1,718,70	585,90	458,30	1,468,90	3,894,40	701,60	594,60
76	Kab. Bandarlampung	-	6,710,80	-	-	-	-	-	-	6,042,60	1,006,80
77	Kab. Indragiri Hilir	-	3,874,40	9,074,70	3,020,00	882,40	1,008,30	777,40	6,649,50		32,306,70

NO	DAERAH	Pendidikan	Kesehatan		Pelayanan Rujukan	Jalan	Irigasi	Air Minum	Sanitasi	Prasarana Pemerintahan	Kelewatian dan Perikanan	Peranian	Lingkungan Hidup	Keluarga Berencana	Kehutanan	Sarana Prasarana Perdesaan	Perdagangan	TOTAL	
			Pelayanan Dasar	Pelayanan Rujukan															
73	Kab. Indragiri Hulu	-	-	-	19.268,00	9.625,50	5.826,50	642,40	528,20	-	3.720,30	5.856,10	945,10	761,30	591,0	932,70	974,60	14.392,60	
79	Kab. Kampar	11.083,90	3.997,10	1.988,30	-	5.861,50	1.351,00	-	-	2.025,10	3.105,10	7.191,10	7.483,50	5.537,70	982,90	703,00	1.065,00	31.794,30	39.596,00
80	Kab. Kuantan Singingi	-	-	-	7.897,80	-	-	-	-	-	1.257,90	1.257,90	6.106,86	-	-	-	-	785,20	15.088,90
82	Kab. Pelaihari	-	-	-	6.047,70	3.996,50	1.988,40	762,90	620,30	-	-	-	-	-	-	-	1.065,00	21.642,70	
83	Kab. Rokan Hulu	19.469,60	-	-	5.688,50	1.394,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44.189,40	44.628,30	
84	Kab. Sikka	-	-	-	8.521,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.460,40	11.516,50	
85	Kota Dumai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.032,10	
86	Kota Pekanbaru	-	3.470,70	-	6.846,00	-	-	-	-	1.199,90	-	-	-	-	-	-	-	4.558,90	
57	Kab. Meranti	-	3.452,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.682,80	
V	Provinsi Kepulauan Riau	-	-	-	5.953,90	-	-	-	-	-	4.729,10	-	-	-	-	-	-	24.788,80	
88	Kab. Bintan	-	8.123,30	2.223,60	-	3.218,60	-	-	593,30	516,10	4.104,30	3.337,00	477,90	-	-	-	-	1.317,90	876,80
89	Kab. Natuna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.687,90	
90	Kab. Karimun	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39.852,20	
91	kota Batam	16.955,60	7.412,70	-	5.124,10	-	706,70	2.118,50	-	5.547,00	-	932,70	956,90	-	-	-	-	3.141,90	
92	Kota Tanjung Pinang	-	-	-	-	-	-	-	-	3.141,90	-	-	-	-	-	-	-	1.439,70	
93	Kab. Lingga	-	-	-	-	-	-	-	-	1.439,70	-	-	-	-	-	-	-	23.894,00	
94	Kab. Anambas	7.655,10	3.527,80	-	-	3.602,80	10.459,60	5.642,80	570,00	475,70	4.359,30	1.250,90	-	-	-	-	-	20.030,00	
VI	Provinsi Jambi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39.795,60	
95	Kab. Batanghari	21.380,00	3.056,90	1.903,70	4.707,20	802,30	653,60	623,70	-	1.512,10	3.205,80	610,50	713,70	819,90	-	-	-	55.727,60	
96	Kab. Bulungan	33.013,20	3.486,20	1.983,20	4.781,20	925,10	689,90	585,70	-	1.744,00	6.411,50	1.633,50	5.872,70	614,30	817,20	-	-	44.282,60	
97	Kab. Kerinci	23.092,20	4.347,60	-	5.114,40	1.154,10	761,70	618,80	1.053,00	882,20	1.208,40	6.778,80	630,30	750,00	-	-	51.654,20		
98	Kab. Merangin	28.966,50	4.768,50	-	5.953,30	1.053,00	-	-	632,40	696,40	2.641,90	9.687,30	1.365,10	812,10	-	-	47.124,00		
99	Kab. Muaro Jambi	21.114,90	3.871,60	2.101,60	5.302,80	842,20	842,20	842,20	631,80	631,80	1.147,30	2.998,40	605,80	721,40	-	-	41.859,90		
100	Kab. Sarolangun	21.487,00	3.596,00	-	-	729,00	712,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	784,20		
101	Kab. Tanjung Jabung Barat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.057,60		
102	Kab. Tanjung Jabung Timur	20.401,90	3.112,80	-	5.083,30	686,90	738,80	574,30	-	7.318,70	8.252,60	783,10	897,50	-	-	-	49.299,20		
103	Kab. Tebo	20.476,30	3.560,00	-	7.180,90	658,80	705,10	589,00	-	1.523,10	3.934,90	625,60	728,50	-	-	-	39.982,20		
104	Kota Jambi	21.052,50	3.574,20	-	6.155,10	610,60	1.313,00	-	-	1.756,60	595,50	807,90	-	-	-	-	32.255,90		
105	Kota Sungai Pejuh	16.507,80	4.260,00	-	3.138,20	1.129,30	699,20	720,70	3.205,40	1.623,00	-	-	779,30	815,30	-	-	32.878,20		
VII	Provinsi Sumatera Selatan	-	-	-	15.221,00	8.321,80	-	-	-	-	1.340,90	2.819,40	862,20	-	-	-	23.742,80		
106	Kab. Lahat	22.517,40	3.746,40	-	4.693,30	1.155,30	752,60	530,40	-	-	-	-	-	-	-	-	41.286,20		
107	Kab. Musi Banyuasin	30.980,90	-	-	7.875,00	814,10	-	-	-	-	8.278,80	1.094,90	878,40	-	-	-	49.922,10		
108	Kab. Musi Rawas	17.592,50	4.336,60	1.950,70	5.191,20	872,80	575,70	2.257,70	-	2.513,80	11.306,90	2.090,60	1.123,50	841,50	-	-	52.616,50		
109	Kab. Muara Enim	-	-	-	6.282,30	610,60	1.314,00	-	-	6.114,70	6.778,80	906,80	14.843,60	-	-	-	14.843,60		
110	Kab. Ogan Komering Ulu	26.583,80	4.921,80	2.111,80	10.822,20	1.216,80	1.159,90	674,80	-	4.379,60	10.349,70	668,80	1.146,60	895,70	-	-	67.107,40		
111	Kab. Ogan Komering Ulu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28.427,00		
112	Kota Palembang	12.246,70	6.020,00	-	6.378,20	891,10	1.873,70	-	-	1.112,20	507,80	617,30	455,00	577,30	1.023,30	-	-	17.580,50	
113	Kota Pagar Alam	8.912,00	-	-	2.747,20	2.661,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19.317,30		
114	Kota Lubuk Linggau	10.174,50	2.382,60	-	1.849,40	463,10	610,60	584,20	-	1.056,70	551,70	701,30	903,10	-	-	-	18.776,90		
115	Kota Pekanbaru	8.463,00	2.870,70	2.313,30	1.154,40	323,80	505,80	492,30	-	1.222,10	622,00	-	-	-	-	-	1.039,00		
116	Kab. Banyakasin	29.165,40	5.344,00	3.108,20	8.334,90	1.406,20	879,10	735,50	-	4.840,70	761,80	803,60	918,90	1.377,90	60.981,70	1.220,70	957,80		
117	Kab. Ogan Ilir	15.518,30	2.829,60	-	4.423,70	895,90	819,30	572,80	1.534,60	-	2.276,30	692,70	-	-	-	-	36.467,00		

(dalam juta rupiah)

No	DAERAH	Pendidikan	Kesehatan		Pelayaran Riuukan	Jalan	Igasi	Air Minum	Santri	Prasarana Pemerintahan	kelautan dan Perikanan	Pertanian	Lingkungan Hidup	Keuangan Berencana	Kehutanan	Sarana Prasarana Perdesaan	perdagangan	TOTAL	
			Pelayaran Dasar	Riuukan															
118	Kab. OKU Timur	26.227,50	4.039,30	1.999,20	3.837,70	605,30	895,00	630,90	537,50	1.705,80	3.019,40	4.213,80	918,70	1.096,90	619,40	846,20	638,80	50.529,30	
119	Kab. OKU Selatan	19.291,70	4.645,20	2.761,50	3.822,00	1.169,40	786,10	654,60	807,60	452,50	2.852,90	1.049,30	4.246,80	526,60	751,30	45.006,30	
120	Kab. Empat Lawang	12.582,70	2.650,80	1.570,70	3.271,60	4.475,10	3.967,0	611,64	603,90	931,40	2.679,70	1.712,00	776,90	676,60	895,50	895,50	895,50	30.489,90	
VIII		Provinsi Bangka Belitung		121		Kab. Bangka		11.035,20		1.570,70		3.20,30		1.164,40		647,90		28.670,20	
122		Kab. Belitung		9.161,70		2.898,20		2.948,20		599,80		627,80		1.654,60		1.255,40		28.792,40	
123		Kota Pangkal Pinang		8.192,10		3.453,50		1.976,10		1.962,30		590,00		893,30		1.595,70		19.871,40	
124		Kab. Bangka Selatan		9.062,10		2.710,30		1.607,00		2.821,40		872,50		639,20		2.202,00		25.044,90	
125		Kab. Bangka Tengah		8.298,50		3.094,60		2.597,80		2.008,70		603,30		649,30		2.101,30		621,10	
126		Kab. Bangka Barat		8.82,40		2.725,90		2.625,90		499,10		611,80		654,20		2.245,80		877,30	
127		Kab. Belitung Timur		9.144,90		3.993,90		1.067,50		514,40		590,10		555,50		1.490,10		1.277,40	
X		Provinsi Bengkulu		128		Kab. Bengkulu Selatan		17.095,40		4.016,60		747,80		595,20		1.687,30		2.999,90	
129		Kab. Bengkulu Utara		16.713,70		4.740,50		643,80		2.174,70		949,40		1.564,30		6.911,80		823,50	
130		Kab. Lejang, Lebong		4.355,40		2.399,70		4.465,30		1.310,50		682,70		874,60		1.324,50		749,50	
131		Kota Bengkulu		13.725,60		2.789,50		2.544,20		636,20		972,30		663,20		2.294,20		842,30	
132		Kab. Paur		15.660,00		3.840,20		1.092,90		3.162,60		628,60		564,60		3.363,30		3.191,20	
133		Kab. Seluma		17.900,10		4.100,70		1.069,90		3.752,40		974,60		644,40		605,60		2.782,70	
134		Kab. Mukomuko		13.304,20		3.590,40		1.049,60		4.947,60		11.099,10		812,40		589,60		1.198,30	
135		Kab. Lebong		10.991,60		3.915,20		947,10		2.482,60		643,20		746,70		1.330,20		577,10	
136		Kab. Kerinci		10.979,60		3.637,10		996,80		2.926,80		593,80		925,30		1.717,50		1.683,50	
137		Kab. Bengkulu Tengah		17.421,20		5.277,70		6.374,30		1.310,50		755,80		636,20		662,70		849,50	
X		Provinsi Lampung		138		Kab. Lampung Barat		11.440,10		5.041,80		1.168,30		6.782,70		2.968,50		581,80	
139		Kab. Lampung Selatan		30.691,30		7.243,90		4.123,90		6.315,80		3.420,40		1.076,50		1.034,80		1.956,10	
140		Kab. Lampung Tengah		44.725,40		5.654,00		2.334,70		10.121,50		1.782,60		833,60		1.650,50		1.480,70	
141		Kab. Lampung Utara		38.145,10		7.523,00		2.334,70		6.405,50		5.225,90		1.106,00		1.292,80		6.556,10	
142		Kab. Lampung Timur		34.377,30		5.633,30		4.778,10		2.916,60		626,30		1.642,60		4.154,30		4.624,20	
143		Kab. Pangandaran		12.325,70		9.356,70		7.252,70		2.868,70		789,50		2.899,40		6.202,70		5.441,70	
144		Kab. Tulang Bawang		15.405,30		3.677,90		2.997,60		5.210,80		1.864,80		726,60		553,80		2.714,40	
145		Kab. Way Kanan		15.972,00		5.360,80		3.101,80		3.477,60		1.776,70		784,40		1.288,30		4.398,20	
146		Kota Bandar Lampung		7.967,50		2.433,60		3.101,80		1.766,70		601,80		720,30		1.139,40		1.024,50	
147		Kota Matto		22.466,90		5.838,90		3.603,60		1.256,90		735,50		764,80		4.090,90		4.166,00	
148		Kab. Pesawaran		13.234,90		10.727,50		2.489,60											

NO	DAERAH	Pendidikan	Kesehatan		Jalan	Irigasi	Air Minum	Sanitasi	Prasarana Pemerintahan	Kelautan dan Perikanan	Perkebunan	Lingkungan Hidup	Keluarga Berencana	Kehutanan	Satara Prasarana Perdesaan	Perdagangan	TOTAL
			Pelayanan Dasar	Pelayanan Rujukan													
156	Kab. Cianjur	68.131,40	9.205,40	2.811,80	8.627,70	2.819,00	1.095,60	934,00	2.952,00	6.1.659,00	1.336,30	1.273,10	844,60	1.352,30	1.302,30	101.270,40	
157	Kab. Cirebon	54.455,70	9.803,70	2.025,10	7.338,80	2.229,50	1.223,90	1.047,20	2.731,00	3.003,30	6.404,90	1.302,30	1.302,30	1.302,30	1.302,30	81.189,20	
158	Kab. Garut	13.761,80	7.907,20	2.025,10	7.007,20	1.151,70	952,30	952,30	7.011,60	863,00	1.010,40	1.131,10	1.131,10	1.131,10	1.131,10	115.553,00	
159	Kab. Indramayu	60.907,20	9.053,20	2.025,10	66.958,80	2.226,80	945,50	934,00	2.877,00	5.226,70	1.664,50	4.020,60	632,60	1.221,00	1.221,00	88.966,20	
160	Kab. Karawang	52.470,20	7.401,30	1.276,90	52.470,20	2.803,30	885,00	759,10	1.664,50	1.664,50	1.664,50	1.664,50	1.664,50	1.664,50	1.664,50	91.141,10	
161	Kab. Kuningan	37.017,40	8.044,40	1.616,20	4.346,80	2.655,30	990,00	728,90	1.559,50	3.698,40	611,10	1.054,50	1.054,50	1.054,50	1.054,50	77.739,30	
162	Kab. Majalengka	25.954,40	6.554,40	1.075,70	4.852,40	1.316,50	778,20	661,10	2.683,70	3.978,80	725,20	873,40	1.143,80	1.143,80	1.143,80	62.322,50	
163	Kab. Purwakarta	28.750,90	6.944,60	3.186,40	6.359,60	2.492,70	826,40	826,40	7.338,50	845,70	1.302,80	1.302,80	1.302,80	1.302,80	1.302,80	50.556,60	
164	Kab. Subang	53.053,40	10.835,30	3.025,10	10.305,30	3.834,40	985,20	913,00	1.869,70	10.158,70	696,30	1.508,80	1.508,80	1.508,80	1.508,80	949,70	
165	Kab. Sukabumi	36.150,30	6.317,90	2.657,90	5.183,50	2.257,20	665,70	665,70	2.226,30	1.827,20	4.222,90	717,60	1.084,80	1.084,80	1.084,80	66.270,90	
166	Kab. Sumedang	36.150,30	8.082,10	2.024,40	6.092,30	2.176,70	1.024,40	833,20	2.607,10	2.343,00	7.808,70	1.107,00	922,40	922,40	922,40	60.545,50	
167	Kab. Tasikmalaya	46.360,00	5.954,10	-	6.505,40	-	954,30	954,30	2.196,50	1.956,50	1.956,50	1.956,50	1.956,50	1.956,50	1.956,50	63.346,80	
168	Kota Bandung	-	10.471,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14.301,10	
169	Kota Bekasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.252,10	
170	Kota Bogor	-	7.155,00	-	7.155,00	-	1.748,60	1.748,60	1.748,60	1.748,60	1.748,60	1.748,60	1.748,60	1.748,60	1.748,60	19.634,90	
171	Kota Cirebon	9.099,90	2.469,10	1.448,00	1.409,80	-	603,00	1.563,20	1.862,10	1.862,10	1.862,10	1.862,10	1.862,10	1.862,10	1.862,10	35.765,50	
172	Kota Depok	26.552,30	6.726,60	-	-	-	827,00	1.650,00	1.470,00	1.470,00	1.190,50	656,80	656,80	656,80	656,80	23.090,70	
173	Kota Sukabumi	9.906,10	3.777,90	3.212,10	1.560,60	-	670,50	1.470,00	1.324,10	1.324,10	834,00	657,60	657,60	657,60	657,60	27.797,20	
174	Kota Tegal	6.152,60	3.387,90	1.910,50	4.455,30	-	681,40	3.124,10	676,20	1.038,10	1.541,00	517,00	517,00	517,00	517,00	28.793,20	
175	Kota Tasikmalaya	13.051,30	5.959,60	1.439,50	2.706,10	450,50	581,00	593,80	1.158,70	1.158,70	1.158,70	1.158,70	1.158,70	1.158,70	1.158,70	15.558,60	
176	Kota Banjar	3.975,50	2.946,00	2.684,70	2.187,20	-	815,20	749,70	2.340,30	1.441,40	3.592,90	627,20	921,50	921,50	921,50	67.873,50	
177	Kab. Bandung Barat	43.404,80	9.214,90	3.890,20	875,30	815,20	3.890,20	3.890,20	7.217,70	4.217,70	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	13.560,60	
XII	Provinsi Banten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23.090,70	
178	Kab. Lebak	56.593,50	7.629,10	1.707,60	5.634,80	4.998,00	908,50	824,10	2.909,60	5.513,30	723,80	986,80	885,60	936,00	885,60	91.147,20	
179	Kab. Pandeglang	55.191,10	8.427,00	4.678,60	6.428,60	6.428,60	821,50	795,20	3.654,00	5.620,30	742,70	1.153,30	877,30	950,70	893,50	893,50	
180	Kab. Serang	29.721,40	4.966,00	5.137,70	1.978,90	1.083,50	910,00	997,10	1.555,20	4.429,60	913,50	4.429,60	4.429,60	4.429,60	4.429,60	48.693,70	
181	Kab. Tanggamus	43.397,10	9.149,60	3.420,10	8.660,00	1.031,20	1.031,20	1.031,20	1.031,20	1.031,20	3.350,20	3.350,20	3.350,20	3.350,20	3.350,20	70.529,90	
182	Kota Gleogan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.552,50	
183	Kota Cangerang	-	5.463,90	-	5.463,90	-	1.529,40	1.529,40	1.529,40	1.529,40	1.116,50	838,50	838,50	838,50	838,50	45.728,80	
184	Kota Serang	27.000,40	5.903,60	-	2.717,50	-	675,90	797,20	3.433,40	1.116,50	679,50	962,80	962,80	962,80	962,80	11.940,60	
185	Kota Tangerang Selatan	-	5.550,10	-	5.819,20	1.031,20	1.031,20	1.031,20	1.031,20	1.031,20	1.545,40	4.505,10	1.545,40	1.545,40	1.545,40	37.739,00	
XIV	Provinsi Jawa Tengah	35.953,50	6.050,30	2.022,00	3.628,50	3.165,40	3.901,00	1.009,30	815,40	5.724,00	1.009,30	5.205,80	786,60	1.059,90	1.249,50	1.249,50	
186	Kab. Banjarnegara	46.156,00	6.790,30	1.651,90	1.651,90	2.967,10	775,80	658,70	5.090,00	3.767,10	633,70	878,70	1.189,70	1.189,70	1.189,70	75.326,30	
187	Kab. Banjarnegara	20.469,50	6.766,80	1.129,90	3.978,10	2.010,80	803,90	617,70	1.531,40	654,30	960,50	664,30	1.112,90	1.112,90	1.112,90	92.515,30	
188	Kab. Banteng	33.126,10	6.815,50	3.211,50	3.989,70	1.734,30	816,50	816,50	1.549,70	615,50	869,20	615,50	666,30	666,30	666,30	55.663,70	
189	Kab. Boyolali	32.111,50	8.194,10	5.484,30	3.594,50	1.098,00	952,10	5.340,00	6.125,60	816,10	967,50	1.240,40	1.240,40	1.240,40	1.240,40	66.824,20	
190	Kab. Brebes	68.390,80	7.756,70	6.871,40	3.334,60	1.105,50	797,10	3.784,50	5.763,20	843,40	974,80	1.218,40	1.218,40	1.218,40	1.218,40	100.844,40	
191	Kab. Cilacap	32.004,40	6.222,80	1.122,00	3.331,10	1.002,70	856,00	5.933,80	3.834,70	638,20	848,20	848,20	848,20	848,20	848,20	56.535,20	
192	Kab. Demak	39.331,70	6.380,10	8.144,40	2.333,50	938,90	805,80	805,80	7.384,50	633,20	961,80	1.290,70	1.290,70	1.290,70	1.290,70	67.472,40	
193	Kab. Grobogan	36.795,00	7.331,00	5.249,50	3.442,30	902,20	755,40	3.200,00	4.413,40	786,40	835,60	946,60	946,60	946,60	946,60	64.454,40	
194	Kab. Jepara	31.470,70	5.705,80	2.087,70	3.764,80	2.570,20	763,80	678,80	1.943,30	3.644,60	757,30	850,20	850,20	850,20	850,20	55.095,10	

NO	DAERAH	Pendidikan	Kesehatan		Pelayanan Rujukan	Jalan	Irigasi	Air Minum	Sanitasi	Prasarana Pemerintahan	Keluarga dan Perkemanan	Fototan	Lingkungan Hidup	Kehutanan	Keluarga Berencana	Sarana Prasaranra Perdesaan	Perdagangan	TOTAL
			Pelayanan Dasar	Pelayanan Dasar														
197	Kab. Kebumen	40.222,30	8.322,20	4.211,80	1.933,20	1.018,80	1.032,10	959,10	630,00	1.856,00	5.328,90	756,80	931,50	924,90	65.818,90	58.447,70		
198	Kab. Kendal	33.417,30	6.297,10	4.395,80	4.983,20	1.843,60	890,10	959,10	2.963,20	4.408,30	3.233,70	635,50	912,40	924,90	70.549,30	30.502,20		
199	Kab. Klaien	45.182,30	8.395,80	4.785,90	4.080,20	954,30	822,20			1.354,20	3.906,00	835,20	680,70	1.050,00			100.312,40	
200	Kab. Kudus	19.045,40	3.699,00	3.C16,60	2.245,20	3.995,70	1.682,70	886,00	786,50	2.511,50	4.719,80	777,10	1.034,60	942,40	66.729,60	1.292,00		
201	Kab. Majelang	70.161,50	7.769,40	3.177,90	2.740,60	1.252,10	753,70			3.865,70	5.778,60	1.037,10	626,80	1.292,00			63.845,50	
202	Kab. Pati	33.471,00	7.939,50	1.538,90	3.611,60	1.856,30	853,70	690,70	4.715,50	3.653,00	750,40	857,00	1.151,00			61.160,20		
203	Kab. Pelalawan	38.123,70	5.813,70	4.399,10	4.874,00	1.074,20	918,20	3.062,60	804,80	853,60	1.275,50					44.803,90		
204	Kab. Pekalongan	39.776,80	6.651,40														56.527,50	
205	Kab. Purbalingga	24.293,10	4.907,90	3.598,20	2.495,10	967,00	736,70	843,50	656,20	1.986,80	4.417,70	731,00	1.038,10	906,40	48.376,40	48.376,40		
206	Kab. Purworejo	5.651,70	1.538,00	3.645,20	5.046,00	2.002,80	772,70	601,30	2.002,80	4.356,00	4.484,00	877,50	750,40	1.285,50			51.310,30	
207	Kab. Rembang	23.118,50	3.989,20	1.787,30	3.915,80	2.002,80	846,90	846,90	846,90	1.058,30	4.059,70	744,70	866,10	959,20			51.644,80	
208	Kab. Semarang	22.720,60	7.572,40	3.701,70	3.876,80	3.367,90	777,40	662,50	1.335,10	4.074,60	856,70	919,30	969,30				49.452,90	
209	Kab. Sragen	28.386,70	6.281,30	1.566,40	3.922,30	1.903,10	777,40	1.509,20	757,00	1.509,20	2.703,00	802,60	855,00	1.200,40			59.002,90	
210	Kab. Sukoharjo	27.782,50	6.040,10	2.136,50	3.765,70	1.158,90	757,00										46.794,10	
211	Kab. Tegal	41.401,30	6.572,70	4.857,30	2.077,40	931,20	864,70	931,20	639,20	2.323,00	3.901,50	871,50	900,50	914,20			72.347,90	
212	Kab. Temanggung	24.625,70	5.684,80	3.533,80	2.611,60	758,20	660,70	1.116,60	660,40	2.700,40	6.932,70	732,20	909,30	919,40	983,20		55.332,70	
213	Kab. Wonogiri	38.076,90	7.479,70	3.340,80	4.325,00	2.708,00	1.116,60	790,60	833,10	1.066,50	4.516,60	644,50	877,20	1.089,80			17.730,10	
214	Kab. Wonosobo	30.005,60	6.303,20	1.188,30	4.223,80	3.125,00	573,90	1.451,10	1.066,50	1.154,30	2.461,10	1.114,80	621,30				20.788,40	
215	Kota Magelang	6.474,50	3.249,00	2.077,70	1.120,70			615,00	1.260,60	3.920,40	637,50						21.182,30	
216	Kota Pekalongan	8.151,40	3.548,50	1.518,10	3.124,80	1.946,50	441,00	589,40	789,40	1.056,30	1.056,30	687,80	501,10	1.102,60			30.292,20	
217	Kota Salatiga	8.385,10	2.458,20	1.946,50	3.124,80	1.581,60	441,00	589,40	789,40	1.056,30	1.056,30	687,80	501,10	1.102,60			29.118,40	
218	Kota Semarang	14.151,20	6.300,20	5.780,70	5.780,70			918,50	1.153,50								46.689,70	
219	Kota Surakarta	18.784,80	3.186,50	2.164,70	3.186,50			670,10	812,50								11.384,10	
220	Kota Tegal	13.376,90	2.859,30	1.057,90	1.515,00	625,50	1.409,50	1.409,50	1.723,70	2.692,50	3.452,70	599,50	678,40				63.565,50	
XV	Provinsi DI Yogyakarta	36.938,70	6.016,50	2.945,90	4.591,60	2.567,90	1.518,10	785,70	1.598,10	2.461,10	1.917,20	919,10	828,70	1.278,70			77.542,70	
221	Kab. Bantul	53.128,40	5.182,80	4.342,50	4.620,40	1.592,60	823,90	1.104,10	764,20	2.083,30	3.845,70	620,90	844,80	1.151,30	973,80		41.614,10	
222	Kab. Gunung Kidul	22.845,60	4.592,00	3.184,10	4.341,50	1.063,90	821,60	1.723,70	2.747,10								69.847,30	
223	Kab. Kulon Progo	50.143,50	4.637,10	3.235,00	5.260,10	3.435,00											13.599,10	
224	Kab. Sleman	10.338,50															56.982,20	
XVI	Provinsi Jawa Timur	40.584,00	7.776,00	12.473,00	13.506,40	24.954,20					4.045,90	4.559,60	607,90	999,60	1.048,60			70.109,30
226	Kab. Bangkalan	44.218,90	9.184,50	2.711,40	3.344,00	4.405,20	972,80	784,30	1.833,80	6.572,10	584,70	1.165,30	827,30				81.595,30	
227	Kab. Banyuwangi	36.672,30	7.945,40	2.119,30	5.466,30	4.037,60	840,80	880,30			4.157,30	759,30	1.013,70				63.901,50	
228	Kab. Blitar	35.897,60	6.274,60	2.421,20	4.829,30	1.063,90											57.317,30	
229	Kab. Bojonegoro	31.964,90	5.683,20	2.695,60	4.753,00	904,40	568,50										58.151,30	
230	Kab. Bondowoso	14.786,90	4.072,30	1.777,90	1.012,50	1.777,90											27.171,20	
231	Kab. Gresik	51.280,40	11.344,30	3.027,70	9.980,30	4.482,70	1.223,30	959,70			4.368,20	1.005,70					87.752,90	
232	Kab. Jember	32.653,90	5.667,30	2.927,70	1.849,30	904,00	771,60										50.219,90	
234	Kab. Jember	36.584,90	7.239,90	2.714,60	4.838,30	5.365,00	905,80	773,40			1.074,80	1.119,50					61.016,20	
235	Kab. Jombang	39.041,30	5.711,40	1.226,60	967,50	2.511,30	4.606,40	4.606,40			1.252,70	1.252,70					59.965,30	
236	Kab. Lumajang	37.886,60	4.433,60	6.792,10	3.743,90	855,60	2.501,30	2.501,30			931,70	931,70					61.751,20	
237	Kab. Madura	24.995,20	5.054,90	3.869,00	1.760,80	713,20	1.056,80										44.983,00	

(dalam juta rupiah)

No	DAERAH	Pendidikan	Kesehatan		Prasarana Peneritinan	Keluarga Berencana	Lingkungan Hidup	Pertanian	Kehutanan	Sarana Prasarana Perdesaan	Perdagangan	TOTAL
			Pelayanan Dasar	Rujukan								
238	Kab. Magetan	28.223.50	4.539.90	1.570.10	3.276.20	2.115.40	711.50	620.50	1.083.00	2.473.90	619.80	891.60
239	Kab. Malang	51.835.90	10.711.50		7.548.20	4.547.70	1.180.60	929.50	3.618.80	5.322.60	1.204.10	1.259.70
240	Kab. Mojokerto	28.494.10	5.087.80		2.498.40	830.20			1.383.80	3.155.60	782.60	1.017.90
241	Kab. Nganjuk	34.037.70	5.676.10	3.161.30	4.436.90	2.257.20	950.00	685.50	1.053.20	3.377.20	717.50	1.040.40
242	Kab. Ngawi	33.535.50	5.915.10	1.568.50	4.619.30	3.391.30	837.20	756.80	5.271.70	5.271.70	719.50	1.193.30
243	Kab. Pidiean	29.044.30	5.893.80	1.187.30	5.019.70	1.396.30	881.20	572.60	1.764.50	2.752.80	745.30	819.30
244	Kab. Pamekasan	27.309.50	6.207.10	2.110.50	4.755.60	1.025.20	865.20	705.90	2.509.50	3.339.90	771.70	1.623.40
245	Kab. Pasuruan	41.981.50	7.370.00		5.504.80	3.752.50	946.80	764.40	2.509.40	4.055.10	1.065.30	1.068.30
246	Kab. Ponorogo	24.640.90	6.212.80		6.010.40	2.595.30	1.007.70	665.70	4.025.90	603.60	1.251.30	879.50
247	Kab. Probolinggo	25.382.80	4.493.70		5.827.30	2.794.30	1.016.70	948.00	3.353.70	3.921.00	983.30	983.30
248	Kab. Sampang	35.105.00	6.404.60	1.615.60	4.048.70	887.10	867.40	898.20	4.142.80	3.878.30	491.80	1.368.30
249	Kab. Sidrap	33.752.00	7.422.00	2.837.30	5.395.30	1.396.10	736.60	1.340.50	595.80	2.798.70	1.050.30	1.050.30
250	Kab. Situbondo	17.633.70	4.225.10		5.156.80	6.116.70	992.20	1.042.90	2.549.60	3.536.70	867.30	987.70
251	Kota Sumenep	27.995.80			5.691.60	2.119.60	5.825.40	1.717.30	992.20	894.50	1.078.80	1.128.40
252	Kab. Trenggalek	13.704.40	4.972.30		5.637.20	1.647.00	1.068.70	608.00	3.407.40	3.109.60	743.50	847.40
253	Kab. Tuban	28.761.10	4.944.40	2.496.10	8.227.10	1.663.50	818.90	1.227.10	4.242.00	4.837.10	976.90	1.090.20
254	Kab. Tulungagung	6.165.40	2.545.40		1.367.10	4.202.60	572.90	868.10	821.60	2.518.00	821.60	1.154.10
255	Kota Blitar	-	-	-	1.722.50	1.742.50	586.50	1.023.30	903.70	992.20	927.20	927.20
256	Kota Kediri	-	-	-	3.413.20	1.742.50	586.50	1.023.30	903.70	992.20	927.20	927.20
257	Kota Madura	-	-	-	3.236.70	1.742.50	586.50	1.023.30	903.70	992.20	927.20	927.20
258	Kota Malang	-	-	-	8.416.40	1.998.20	963.50	564.20	1.163.10	811.30	567.20	618.50
259	Kota Mojokerto	-	-	-	4.516.50	2.471.80	1.257.30	285.40	590.90	997.30	1.063.10	441.90
260	Kota Pasuruan	8.125.60	3.688.10	2.737.00	1.457.00	438.10	607.20	1.240.20	1.623.10	895.20	617.30	1.340.30
261	Kota Probolinggo	39.903.70	8.153.70		5.156.20	1.133.30	1.749.00	591.00	1.133.30	1.131.40	1.111.40	903.70
262	Kota Surabaya	7.185.30	3.998.90		2.008.30	546.00	591.00	561.30	1.158.70	1.007.20	703.10	575.20
XVII	Provinsi Kalimantan Barat	15.472.70	2.955.10	4.680.10	12.709.30	7.225.40	956.70	925.60	2.950.20	3.135.90	873.50	984.20
264	Kab. Bengkayang	22.415.80	4.133.50	1.165.00	2.471.80	1.065.00	2.854.40	1.355.30	3.124.70	3.314.50	793.20	1.154.20
265	Kab. Landak	20.100.70	4.619.20		13.016.60	2.640.70	2.301.90	1.022.30	3.428.30	4.309.50	995.30	1.022.30
266	Kab. Kapuas Hulu	19.047.60	5.155.80	2.199.10	10.875.40	2.381.50	902.30	621.80	3.719.30	2.782.70	854.20	1.054.20
267	Kab. Kerapang	14.790.20	3.527.30	3.098.60	3.714.40	2.138.80	721.60	611.30	2.785.00	4.192.10	1.479.70	704.00
268	Kab. Pontianak	26.692.00	6.687.20	1.912.50	6.313.00	1.352.40	956.70	925.60	2.096.00	3.960.90	414.90	887.70
269	Kab. Sarawas	32.693.60	4.546.80	1.565.00	5.876.30	1.166.50	7.376.20	2.335.20	961.90	1.413.90	3.337.73	973.50
270	Kab. Sanggau	24.507.80	4.133.50	1.165.00	9.843.50	2.854.40	875.60	624.20	2.301.50	2.176.32	1.283.10	1.283.10
271	Kab. Sintang	11.318.20	4.520.60		2.461.40	878.40	686.20	1.462.80	2.193.00	1.054.20	755.10	1.340.30
272	Kota Pontianak	9.162.00	3.844.50	2.619.20	3.474.70	1.298.10	607.70	545.40	1.944.20	764.00	660.90	1.413.20
273	Kota Singkawang	11.343.30	3.407.50	3.263.60	3.172.40	890.00	660.90	521.40	1.643.70	985.80	774.00	1.022.30
274	Kab. Sekadau	9.510.50	4.299.10		7.863.30	1.072.70	830.10	1.475.40	1.497.70	1.603.60	833.20	887.70
275	Kab. Melawai	10.761.00	4.047.90		5.990.60	998.70	683.10	677.80	2.626.30	3.236.30	1.585.00	669.10
276	Kab. Kayong Utara	20.840.50	5.096.40	5.082.90	747.70	761.10	812.60	2.840.20	2.990.30	6.607.70	634.90	1.109.90
277	Kab. Kubu Raya				10.920.20	4.663.00	16.513.00	10.920.20	1.359.30	561.40	1.375.40	1.688.00
XVIII	Provinsi Kalimantan Tengah	9.842.20	2.685.60	2.684.40	4.878.40	1.359.30	759.60				5.879.90	593.00
278	Kab. Barito Selatan										644.40	644.40

(dalam juta rupiah)

NO	DAERAH	Pendidikan	Kesehatan			Jalan	Irigasi	Air Minum	Santasi	Frasarana Pemerintahan	Kelewat dan Perikanan	Lingkungan Hidup	Keluarga Berencara	Kehutanan	Sarana Perasaraan Perdesaan	Perdagangan	TOTAL	
			Pelayanan Dasar	Pelayanan Rujukan	Pelayanan Rujukan													
359	Kab. Luwu Utara	14.90010	4.18200	1.74740	7.78330	2.51310	725.50	564.30	3.020.00	2.818.20	783.50	754.10	795.50			40.591.00		
360	Kab. Maros	22.07530	3.77730	2.46150	5.902.90	1.142.20	681.30	548.30	2.661.10	2.917.50	857.40						46.312.00	
361	Kab. Pangkep/Kepulauan	19.99070	3.07810	2.771.90	1.214.50	708.50	660.10	8.176.90	2.400.60	729.00	747.20	773.00	974.00				44.142.80	
362	Kab. Pinrang	22.89150	4.12810	4.194.90	1.725.70	651.50	547.30	4.864.10	4.318.30	1.959.40	740.90	855.20	981.10				48.491.20	
363	Kab. Selayar	10.48530	3.45930	3.78550	3.715.50	688.20	498.50	1.522.30	4.848.50	2.942.20	775.40	662.70	1.085.60	1.199.80				25.670.60
364	Kab. Sideneung/Rappang	18.08330	3.83540	1.789.30	1.789.30	619.60	508.70	1.226.70	2.034.30	3.243.40	722.50						37.286.70	
365	Kab. Sinai	14.81220	3.44220	1.728.10	3.853.20	2.489.30	677.50	552.60	5.211.40	2.360.10	624.50	726.70					38.832.80	
366	Kab. Soppeng	17.95520	3.17620	4.47350	1.839.20	670.70	877.30	1.581.10	2.626.80	603.70							34.562.80	
367	Kab. Takalar	4.33640	2.50330	4.518.40	2.503.30	631.20	573.50	4.126.60	2.307.80	756.50	766.50						3.478.40	
368	Kab. Tana Toraja	19.27480	4.73760	3.762.10	7.579.60	2.823.60	802.70	542.50	1.499.80	3.696.50	892.50	784.00	852.10	1.041.70	1.047.30		29.336.80	
369	Kab. Wajo	26.34230	4.04330	1.60670	5.342.20	1.135.40	801.10	828.10	3.532.90	3.130.50	812.10	818.10	832.70				49.285.10	
370	Kota Parepare	10.48420	2.69120	2.311.30	2.056.00	449.30	593.20	1.231.20		1.940.90	655.80						23.514.40	
371	Kota Makassar	29.52230	4.916.80	7.632.30	837.90	1.814.00					1.940.90	1.030.30					45.753.70	
372	Kota Palopo	10.00930	2.908.00	1.539.70	2.051.10	541.20	621.10	535.40	2.085.00		909.20	679.90					21.880.50	
373	Kota Luwu/Timur	10.30580	2.982.90	4.531.70	1.391.40	632.20	474.80	3.108.60	2.186.10	838.70	682.40						28.148.50	
374	Kab. Luwu/Tengah	19.46780	4.47610	7.331.00	6.260.00	1.441.60	707.20	548.50	3.822.40	1.905.20	3.207.70	649.40	744.30	1.144.10			46.032.50	
Provinsi Sulawesi Barat				2.220.80	7.980.20	7.331.00											27.522.00	
375	Kab. Malene	12.63830	4.141.90	1.610.50	715.70	618.00	603.60					602.70	672.10				29.958.70	
376	Kab. Mamuju	17.44930	3.833.60	4.030.20	2.846.40	2.167.20	710.90	853.90	1.423.40	3.805.00	3.118.90	928.10	954.10				41.272.10	
377	Kab. Polewali Mandar	21.36120	4.494.60	1.696.80	3.404.70	715.70	920.00	1.554.90	2.826.40	621.40	766.90	932.10	1.032.20				47.456.50	
378	Kab. Mamasa	17.51670	3.480.10	2.830.60	1.602.00	713.20	574.40	1.279.50	2.095.10	3.536.10	893.90	728.70					37.424.50	
379	Kab. Mamuju Utara	9.81630	3.695.50	2.888.80	2.750.50	798.40	600.10	546.20	2.567.80	5.350.30	748.50	598.50					31.872.40	
Provinsi Sulawesi Tenggara				2.636.30	14.375.70	6.167.60											24.032.40	
380	Kab. Buton	26.78710	4.710.30	1.219.60	3.551.30	835.40	761.30	934.60					920.70	816.40	935.10	1.071.60		50.716.10
381	Kab. Konawe	31.68710	4.119.20	6.675.00	3.374.60	5.161.20	674.00	654.50					933.30	1.028.10				56.434.50
382	Kab. Kolaka	23.80420	3.887.80	2.804.20	1.919.30	2.726.90	750.20	694.10					650.70	3.726.90	869.80	964.40		49.064.90
383	Kab. Muna	27.38410	4.053.60	1.811.40	4.290.60	1.059.80	722.30	936.90					5.173.90	2.508.10	937.90	1.028.30		52.310.00
384	Kota Kendari	13.79120	3.791.90	1.046.90	3.340.70	498.60	638.90	793.20					824.60	696.10	998.50			28.684.50
385	Kota Bau-Bau	12.58200	2.628.40	1.080.60	1.482.40	1.080.60	702.70	669.80	609.90					2.367.30	670.50			22.747.80
386	Kab. Konawe Selatan	21.82330	4.407.00	5.427.60	3.521.70	717.50	1.065.40						3.851.50	4.884.80	889.70	931.00	1.088.00	51.853.50
387	Kab. Bombana	16.76530	3.406.30	3.131.10	1.107.30	678.90	527.30						4.128.50	2.814.20	626.70	759.30		34.976.10
388	Kab. Wakatobi	15.33630	2.516.80	1.194.30	2.726.90	512.20							1.630.10	2.390.10	643.50	736.60		31.471.20
389	Kab. Konawe Utara	11.46400	2.923.20	1.076.40	2.554.10	921.80	612.60	508.00					6.040.00	1.867.00	833.90	713.20		31.402.50
390	Kab. Konawe Utara	12.53350	3.234.20	3.935.30	3.746.10	1.014.20	733.50	913.00	3.395.70	2.209.20	2.742.80	650.60					31.872.40	
391	Kab. Buton Utara	13.73030	3.709.80	1.525.90	4.663.30	4.017.90							2.333.80	3.516.00	821.60			32.259.20
392	Kab. Badung	15.12070	4.376.00	-	2.773.90	869.10	608.20	682.60					2.794.50					11.135.10
393	Kab. Buleleng	42.83220	5.721.50		4.876.80	2.313.80	667.40	911.00					2.148.40	3.035.60				29.437.30
394	Kab. Gianyar	25.91600	3.987.20		4.071.20	607.10							1.971.40					43.762.40
395	Kab. Gianyar	16.58910	4.046.00	1.567.90	3.089.10	1.534.60	599.30	624.60					1.570.00	803.00	803.00			34.720.80
396	Kab. Jembrana	34.15330	4.898.50	3.117.40	3.208.10	1.677.60	633.50	721.70					1.466.50	728.00	816.90	941.10		56.334.80
397	Kab. Karangasem	16.34420	3.713.70	2.525.00	839.50	670.30							1.465.60	1.679.80	855.40	811.30		29.495.20

NO	DAERAH	Pendidikan	Kesehatan		Jalan	Ingrasi	Air Minum	Sanitasi	Prasarana Pemerintahan	Kelautan dan Perikanan	Pertanian	Lingkungan Hidup	Keutuhan Berencana	Sarana Prasarana Perdesaan	Perdagangan	TOTAL	(dalam juta rupiah)	
			Pelayanan Dasar	Rujukan														
399	Kab Tabanan	26.214,30	4.750,00	1.522,10	3.456,20	3.109,40	621,60	980,00	1.916,10	2.248,10	705,10	810,10	1.340,70			47.642,70		
400	Kota Denpasar	10.551,00	2.870,00														14.433,60	
XVIII Provinsi Nusa Tenggara Barat																		
401	Kab. Bima	25.638,90	4.714,80	2.555,70	6.019,40	5.646,80	794,50	653,10	5.708,80	3.443,80	619,50	887,30	942,70	1.082,60	852,90	56.171,40		
402	Kab. Dompu	16.792,50	3.753,10	1.683,00	3.934,10	5.141,10	745,70	650,30	2.991,30	4.091,90	753,10	1.097,90	967,30	1.020,80	1.065,80	39.995,70		
403	Kab. Lombok Barat	20.910,50	5.06,80														46.058,10	
404	Kab. Lombok Tengah	33.240,50	1.840,60	4.598,20	2.222,20	925,00	903,40	1.168,40	1.588,10	3.034,90	4.045,60	965,10	963,30	961,50	986,00	59.579,50		
405	Kab. Lombok Timur	34.330,50	7.604,40	2.832,10	5.306,80	5.999,40	1.002,00	1.058,50	7.015,00	3.953,10	635,50	1.038,50	595,70	1.072,30	890,90	71.729,90		
406	Kab. Sumbawa	28.055,00	4.355,50	6.422,90	12.134,70	9.54,40	616,60	804,80	616,50	4.709,20	4.378,20	949,30	986,60	1.072,20	56.562,70			
407	Kota Mataram	12.633,00	3.809,00	2.255,10	678,10	704,00	1.402,20	1.348,10	1.032,90	2.167,60	561,70	743,30	737,50	679,30		24.135,00		
408	Kota Bima	11.417,70	3.386,30	2.252,90	472,00	707,40	1.032,90	1.272,30	2.084,80	738,70	728,10		728,10	971,00	1.026,00	24.581,80		
409	Kab. Sumbawa Barat	10.865,30	2.997,30	2.219,40	882,40	616,30	455,30	679,50	554,60	3.643,30	2.182,20	606,60	663,30		589,90	34.167,40		
410	Kab. Lombok Utara	12.632,30	4.62,30													30.106,90		
XXIX Provinsi Nusa Tenggara Timur																		
411	Kab. Alor	15.657,60	4.338,70	6.760,10	5.566,70	706,60	574,40			3.866,60	2.918,80	980,80	856,40	1.130,40	1.479,80	40.856,80		
412	Kab. Belu	25.514,10	4.382,80	4.932,60	1.519,50	905,60	780,10			2.991,20	4.637,70	922,20	933,30	1.451,90	1.063,10	984,00	51.019,70	
413	Kab. Ende	13.461,20	3.571,30	1.462,00	1.638,00	780,20	580,70			2.363,10	3.534,30	943,40	1.049,00	1.055,90	1.146,20		34.752,30	
414	Kab. Flores Timur	13.282,20	4.205,40			5.048,20	1.093,70	722,20	618,20	2.634,20	4.751,40	547,00	856,20	968,60	1.148,00		36.526,20	
415	Kab. Kupang	17.159,10	5.103,90	1.288,70	4.318,80	2.310,80	708,40	614,50		2.941,10	2.475,50	939,50	807,40	1.141,40			41.608,60	
416	Kab. Lembaria	10.334,80	5.212,00	1.858,30	681,50	1.060,50	681,10	612,10		2.411,50	1.636,30	965,10	719,50	986,70	1.179,30		30.835,10	
417	Kab. Manggarai	17.395,10	4.903,10	4.480,10	2.075,80	902,50	643,30	1.940,10	1.982,20	4.007,90	1.503,50	787,30	991,50	1.079,90			42.693,10	
418	Kab. Ngada	15.066,10	4.867,20	5.655,20	2.800,20	762,60	684,40	2.035,70	4.882,30	1.028,30	754,50	1.261,50				41.564,00		
419	Kab. Sikka	15.676,60	3.642,80	1.963,60	5.103,60	561,60	610,60			3.211,50	3.819,30	800,10	819,30	1.111,40			40.295,20	
420	Kab. Sumba Barat	15.999,00	5.835,80	3.360,70	4.236,90	2.902,60	793,60	699,10		2.887,20	7.863,30	1.007,40	802,30	1.343,00	1.226,30		50.094,60	
421	Kab. Sumba Timur	18.918,20	5.768,60	2.070,70	7.011,00	2.161,30	794,90	569,10		2.693,70	9.559,00	938,00	818,30	1.791,90	1.134,80	821,90	52.532,20	
422	Kab. Timor Tengah Selatan	21.165,10	4.543,80	2.700,70		7.447,20	2.029,20	909,40		1.449,40	6.755,80	901,20	870,30	813,50	1.098,50	908,60	52.656,60	
423	Kab. Timor tengah Utara	11.653,00	4.678,60		6.046,50	1.830,60	715,30	598,00		1.713,60	3.794,20	932,00	865,80	1.202,20	820,30		34.957,30	
424	Kota Kupang	3.773,90	4.984,30	5.655,20	2.800,20	762,60	684,40			2.822,30	897,30	693,10	1.250,50				31.014,40	
425	Kota Ende	12.498,50	3.261,50	3.348,90	5.503,20	2.561,70	682,20	524,90		4.676,00	3.089,90	555,30	770,30	1.035,40	754,00		36.560,50	
426	Kab. Manggarai Barat	7.838,50	4.054,80	5.381,40	2.763,70	793,30	563,10	1.389,50	2.937,60	2.594,60	805,40	774,60	906,30	1.065,20		32.497,80		
427	Kab. Nagekeo	10.549,0	4.639,00			4.733,60	1.282,20	731,80		3.407,00	1.385,10		803,20	720,60	901,60	907,20		31.930,90
428	Kab. Sumbawa Barat Daya	18.443,60	5.530,40	5.255,10	1.075,70	795,50	615,30	3.264,00	1.720,80		897,70	676,70	1.656,00	1.774,30	848,70	41.378,00		
429	Kab. Sumba Tengah	9.859,50	3.454,30		3.423,20	713,10	673,50	472,80		3.570,80	1.578,80	1.815,40	961,30	685,70	1.958,60	811,40	30.081,00	
430	Kab. Manggarai Timur	19.570,90	4.456,80		5.119,90	1.065,20	865,70	589,20		2.125,60	2.822,30	805,10	743,10	1.436,80	863,40		45.413,00	
431	Kab. Sabu Raijua	7.316,60	4.836,80	3.253,10	2.099,70	682,90	506,90	4.530,10	1.537,90	3.092,31				841,10		791,50	30.085,80	
XXX Provinsi Maluku																		
432	Kab. Maluku Tenggara Barat	12.791,40	4.223,10	3.191,90	5.315,20	2.763,70	827,20	579,20		2.860,90	4.904,20	1.062,30	760,40		1.652,00			
433	Kab. Maluku Tengah	3.420,50	1.245,30	8.873,20	1.223,50	978,80	593,70	1.351,40	6.010,30	6.338,20	895,10	932,90	947,10	1.256,90			61.182,10	
434	Kab. Maluku Tenggara	11.138,90	3.207,00	3.221,40	5.150,30	1.125,80	731,20	613,30		2.054,60	1.846,50	4.600,90	1.099,90	1.535,30	1.452,70		37.092,40	
435	Kab. Pulau Buru	14.985,90	4.871,00	3.627,90	1.460,00	666,40	573,20	1.713,60	1.410,20	3.082,00	2.670,50	1.867,70	1.535,30	1.418,20			42.539,70	
436	Kota Ambon	15.374,20	2.416,90	2.486,00	696,10	952,80	675,20	2.133,20		2.670,50	2.867,70	872,60				28.449,00		
437	Kab. Seram Bagian Barat	14.071,80	3.597,60	3.535,70	964,20	675,50	648,70	1.992,60	3.610,70	859,90	707,90	934,00	1.303,10	806,40	43.034,50			
438	Kab. Seram Bagian Timur	10.881,50	3.486,60	3.426,70	760,50	696,90	627,10	1.765,90	2.607,80	1.982,80	611,20	1.024,30	1.615,10			34.605,80		

No	DAERAH	Pendidikan	Kesehatan		Prasarana Pemerintahan	Sanitasi	Prasarana Pemerintahan	Keluarga Berencana	Lingkungan Hidup	Kehutanan	Sarana Prasarana Perdagangan	TOTAL	
			Pelayanan Dasar	Rujukan									
439	Kab. Kepulauan Aru	7.003,20	4.229,50	3.137,50	4.932,80	671,00	545,00	2.027,40	1.137,10	3.679,90	1.087,10	30.901,50	
440	Kota Tual	15.657,00	3.427,90	4.347,10	2.746,70	732,60	552,70	4.647,80	2.459,90	2.882,10	986,70	33.948,70	
442	Kab. Buru Selatan	10.865,50	4.980,00	2.452,20	3.375,20	910,10	665,50	518,10	4.043,30	1.227,00	1.890,00	704,80	37.630,10
XXI Provinsi Maluku Utara	Kab. Halmahera Tengah	5.359,00	3.638,50	3.209,60	1.160,50	676,30	913,80	1.898,40	1.648,50	7.513,30	1.084,20	654,20	30.586,10
444	Kab. Halmahera Barat	10.409,10	4.491,60	5.537,40	797,10	756,50	711,40	2.609,40	6.552,10	1.005,30	707,40	1.112,40	35.910,90
445	Kota Ternate	10.484,50	4.013,10	2.569,00	650,90	1.055,60	650,90	2.867,80	2.867,80	1.092,90	758,20	1.161,80	24.653,80
446	Kab. Halmahera Timur	8.461,70	4.455,60	3.825,00	1.967,00	4.062,80	780,60	598,40	1.627,40	1.655,80	2.113,30	1.084,20	31.244,40
447	Kota Ideale Kepulauan Sula	8.411,50	4.246,00	1.108,00	4.794,70	1.135,00	681,40	693,40	3.006,40	3.868,40	1.620,30	827,20	25.599,50
448	Kab. Kepulauan Sula	16.545,50	3.302,70	1.227,40	6.255,90	895,70	809,00	851,80	8.386,60	9.006,40	735,10	987,20	28.826,00
449	Kab. Halmahera Selatan	10.349,90	3.701,90	3.263,20	1.457,10	625,90	726,00	6.046,70	3.836,20	995,90	806,50	1.331,20	44.598,30
450	Kab. Halmahera Utara	6.739,30	4.696,40	2.871,60	675,60	592,40	531,60	4.934,20	2.018,60	1.875,90	958,30	1.009,00	26.902,90
XXII Provinsi Papua	Kab. Biak Numfor	15.068,30	5.531,20	9.350,60	49.158,20	16.566,20	60,00	707,10	622,90	8.835,70	815,20	937,50	49.051,50
452	Kab. Jayapura	13.668,70	4.718,30	7.187,90	11.316,20	1.562,80	765,00	552,50	7.933,30	3.133,40	764,70	812,00	9.565,40
453	Kab. Jayawijaya	22.979,00	8.021,40	2.549,70	9.347,20	2.447,70	934,20	2.447,70	2.446,60	5.738,10	957,00	864,70	45.192,10
454	Kab. Merauke	21.735,00	8.390,50	3.959,80	31.668,80	5.448,70	1.974,40	1.062,50	7.944,60	5.522,40	806,50	965,50	72.324,20
455	Kab. Mimika	9.529,30	5.887,10	4.400,00	13.752,80	1.595,60	1.198,40	730,00	1.972,00	2.241,50	898,70	820,90	93.766,50
456	Kab. Nabire	9.397,90	5.426,60	5.422,10	3.556,20	1.151,20	899,40	591,30	4.950,80	3.059,20	799,30	740,10	46.369,50
458	Kab. Paniai	13.333,20	6.202,40	7.045,40	843,10	526,30	1.862,70	1.311,90	2.745,60	3.104,90	708,30	1.195,90	272,10
459	Kab. Puncak Jaya	12.829,80	10.285,80	3.232,40	13.663,40	1.562,80	705,80	549,50	1.457,60	4.030,50	1.487,30	812,00	50.059,40
460	Kab. Kepulauan Yapen	12.907,90	4.441,50	4.490,60	3.552,50	614,00	2.549,70	2.549,70	1.232,40	2.262,00	1.231,90	975,40	38.880,70
461	Kota Jayapura	13.804,90	6.036,90	6.036,90	3.257,50	663,80	767,40	885,80	3.444,40	1.199,30	821,00	1.267,00	22.148,50
462	Kab. Sami	7.235,60	4.006,80	8.006,80	1.557,90	585,50	585,50	2.000,70	2.522,50	1.024,40	2.246,83	2.885,70	32.106,30
463	Kab. Keerom	13.479,70	4.348,40	7.764,40	10.048,70	875,60	559,90	1.364,60	3.487,20	1.168,40	666,90	1.455,20	44.132,20
464	Kab. Tahulimo	11.447,60	10.785,50	5.660,60	13.277,10	1.348,70	745,90	2.750,20	3.161,50	2.526,40	1.203,70	663,90	42.409,00
465	Kab. Pegunungan Bintang	15.182,20	10.651,90	10.035,30	1.601,60	798,20	4.127,10	1.383,40	7.188,40	1.134,50	838,20	3.356,40	65.575,00
466	Kab. Tolikara	11.330,30	7.881,80	5.776,30	11.316,20	1.376,90	1.021,10	1.021,10	1.805,20	1.354,00	1.207,20	705,50	38.880,70
467	Kab. Boven Digoel	9.595,30	6.142,90	15.786,20	1.021,10	483,50	1.021,10	1.021,10	1.634,70	2.643,70	672,90	1.024,40	2.745,90
468	Kab. Mappi	6.456,40	9.130,00	13.936,40	1.007,20	532,60	1.007,20	1.007,20	5.726,60	1.034,40	1.034,40	3.354,00	43.558,40
469	Kab. Asmat	12.122,50	9.252,70	3.410,70	19.627,30	1.545,40	589,20	2.449,30	2.623,00	1.362,20	707,50	1.479,30	36.217,20
470	Kab. Wamena	12.547,60	6.225,70	10.785,50	1.027,10	9.793,40	1.181,60	668,80	466,10	2.884,50	2.505,70	1.101,20	58.931,80
471	Kab. Supiori	10.310,80	3.70,90	5.805,30	5.805,30	1.601,60	459,80	1.562,20	1.562,20	832,20	735,70	1.272,70	25.803,40
472	Kab. Mambram Raya	5.013,20	5.982,60	11.330,30	11.846,50	1.763,90	828,40	402,60	5.442,80	859,70	812,50	1.145,80	34.677,90
473	Kab. Membramo Tengah	32.394,10	12.512,80	11.330,30	10.836,90	1.742,10	1.119,90	1.119,90	1.119,90	1.373,30	2.155,70	77.932,30	
474	Kab. Tolimo	28.982,10	5.716,90	7.341,20	1.751,50	918,80	814,30	9.090,60	2.724,20	5.479,70	1.128,30	853,40	1.455,40
475	Kab. Larantuka	29.532,00	11.136,90	9.052,50	1.927,90	1.927,90	1.927,90	9.194,30	3.518,90	1.142,00	1.142,00	1.196,60	2.027,50
476	Kab. Nduga	25.477,60	11.714,20	2.004,40	7.631,40	983,40	885,70	5.039,80	1.188,70	1.188,70	1.188,70	2.105,80	25.803,40
477	Kab. Puncak Jaya	14.403,10	10.452,00	11.005,90	1.414,10	709,70	11.516,90	4.209,60	8.493,90	1.609,60	2.225,40	56.960,20	
478	Kab. Dogiyai	8.958,40	6.000,80	3.330,20	829,90	859,00	543,50	4.738,40	1.116,00	4.777,50	839,60	964,50	33.478,20
479	Kab. Intan Jaya	7.430,60	8.774,60	4.472,20	782,40	510,10	10.567,50	4.616,10	4.114,90	1.455,00	1.455,00	42.723,40	

(dalam juta rupiah)